

Tertarik dengan LABKD? Ikuti Saja Pedoman Ini.

Telah tersedia sejumlah pedoman bagi Pemerintah Daerah/
Pemerintah Desa yang tertarik untuk menjalankan LABKD:



1 Peraturan Tingkat Nasional

- ▶ Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Adminduk (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013)
- ▶ Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Adminduk
- ▶ Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2019 tentang Strategi Nasional Percepatan Administrasi Kependudukan untuk Pengembangan Statistik Hayati
- ▶ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- ▶ Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
- ▶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa



2 Perda Tingkat Kabupaten/Kota

- ▶ Peraturan Bupati (Perbup) mengenai Kewenangan Lokal Berskala Desa (Contoh: Perbup Lumajang, Perbup Trenggalek, Perbup Bondowoso)
- ▶ Peraturan Bupati mengenai Pengelolaan Keuangan Desa (Contoh: Perbup Lumajang, Perbup Bireuen)
- ▶ Peraturan Bupati mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa (DD), yang secara eksplisit menyebutkan adminduk sebagai prioritas (Contoh: Perbup Pangkajene dan Kepulauan)
- ▶ Perbup Percepatan Layanan Adminduk di Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan NTB
- ▶ Perbup Percepatan Cakupan Kependudukan yang melibatkan lintas sektor di Papua
- ▶ Jika tidak ada kedua perbup pertama, pemda dapat merujuk pada aturan lainnya yang tersedia, sepanjang aturan tersebut memberi kewenangan kepada desa untuk memfasilitasi layanan administrasi kependudukan (Contoh: Perbup Bondowoso mengenai Juklak Gerakan Adminduk Tuntas)



3 Pedoman Teknis dan SOP

- Pedoman Teknis LABKD
- SOP LABKD:
 - SOP Rekrutmen Fasilitator PASH
 - SOP Pendataan dan Pemutakhiran Data Penduduk
 - SOP Fasilitasi Dokumen Kependudukan
 - SOP Koordinasi Fasilitator PASH dengan Disdukcapil
 - SOP Penyajian Data Kependudukan Skala Desa
- Pedoman Perencanaan dan Penganggaran LABKD
- Panduan Pelatihan Fasilitator PASH
- Panduan Pemantauan dan Evaluasi